

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran



Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

Penulis :
Afal Ranggajati
Aldo Prayuda

Ucapan Terima Kasih :

Dalam penulisan ini kami sampaikan terimakasih kepada segenap Peneliti Forbil Institute Wawan Mas'udi dan Rini Wijayanti;
Peneliti IGPA Dyah Ratih Sulistyastuti,
Kurnia Cahyaningrum Effendi, Cinintya Audori Fathin;
Dosen Universitas Sriwijaya Anang Dwi Santoso;
Dosen Komunikasi Universitas Pembangunan Negeri "Veteran" Yogyakarta Arika Bagus Perdana;
Annisa Wiharani PhD Candidate Groningen University yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan artikel berikut

Yogyakarta, Indonesia
Mei 2020

Hak Cipta © oleh IGPA dan Forbil Institute

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

1. PENGANTAR

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang melanda Indonesia di tahun 2020 ini menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Berdasarkan informasi dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mencatat 1,6 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak ekonomi pandemi virus corona¹. Hasil survei SMRC menyatakan 77 persen warga menilai virus corona atau COVID-19 telah mengancam penghasilan mereka. Pandemi itu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam dan tabungan berkurang hanya cukup beberapa minggu. Namun sekitar 23 persen mengatakan COVID-19 tidak mengancam penghasilan². Selain itu Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (COVID-19). Sementara 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK)³. Jumlah ini pun diprediksi dapat akan terus bertambah. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah menjajikan beberapa kebijakan khusus seperti program Kartu Prakerja, padat karya tunai, program keselamatan polri, terbitkan surat utang, insentif untuk para tenaga medis. Namun dari beberapa kebijakan tersebut, kebijakan Kartu Prakerja adalah yang paling bermasalah bagi masyarakat.

Permasalahan dari kebijakan Kartu Prakerja tersebut adalah disamping anggaran yang begitu besar, kebijakan Kartu Prakerja berjalan tidak efektif. Jika melihat dari tujuan awal kebijakan Kartu Prakerja, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai bantuan kepada para pencari kerja maupun pekerja aktif dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang butuh peningkatan kompetensi⁴. Namun melihat kondisi di tengah wabah COVID-19, tujuan awal dari kebijakan Kartu Prakerja bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan masyarakat saat pandemi ini. Kondisi yang terjadi pada saat COVID-19 ini menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ada 4 faktor imbas dari pandemi COVID-19, diantaranya adalah ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang menipis. Bahan baku tersebut khususnya yang berasal dari impor, seperti dari negara Cina dan negara lain yang terpapar wabah virus Corona, kedua melemahnya rupiah terhadap dolar. Menurut Iqbal, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga 17 ribu per dolar. Ketiga kunjungan wisatawan ke Indonesia. Iqbal mengatakan bahwa industri ini sudah terpukul sejak awal. Jumlah pengunjung hotel, restoran, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan disebut sudah menurun drastis akibat wabah COVID-19. Keempat kunjungan wisatawan ke Indonesia. Iqbal mengatakan bahwa industri ini sudah terpukul sejak awal. Jumlah pengunjung hotel, restoran, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan disebut sudah menurun drastis akibat wabah COVID-19⁵.

¹ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-16-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>

² Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-77-warga-menilai-corona-ancam-penghasilan/5376217.html>

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4223222/ilo-125-miliar-pekerja-dunia-terancam-kena-phk-akibat-corona>

⁴ Lihat <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01324949/bukan-untuk-menggaji-pengangguran-presiden-jokowi-jelaskan-dua-tujuan-kartu-prakerja>

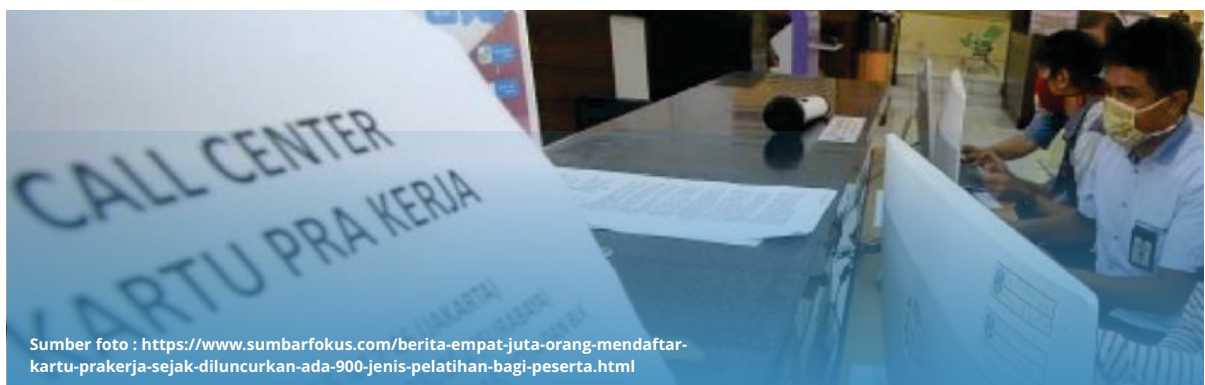
⁵ Lihat <https://metro.tempo.co/read/1328446/4-sebab-phk-buruh-di-masa-pandemi-corona-versi-kspi/full&view=ok>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Dari beberapa faktor tersebut tentu akan berimplikasi pada terjadinya PHK yang akan turun dan disusul dengan pendapatan masyarakat yang akan menurun. Masyarakat yang kehilangan sumber finansialnya tentu saja tidak akan mempunyai daya konsumsi bahkan untuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa saat ini yang segera dibutuhkan adalah bantuan yang sesegera mungkin untuk dapat bertahan hidup dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi. Selain itu berdasarkan informasi, bahwa Index ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini berada dibawah angka 100⁶. Dari data tersebut dapat dianalisis dengan di fokuskannya pada kebijakan Kartu PraKerja yang tujuannya adalah agar masyarakat dapat terlatih dan siap diterima di lapangan kerja, tentu saja ini tidak dapat menjawab permasalahan yang ada pada saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk tahun ini dari sebelumnya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima manfaatnya juga sudah ditambah dari sebelumnya 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang⁷. Rincian biaya tersebut adalah pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta.⁸ Kemudian dari data yang ada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dari awal dibuka hingga hari ini, terdapat 9,4 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja melalui laman prakerja.go.id. Sementara untuk jumlah peserta yang lolos gelombang I dan II tercatat mencapai 456.265 orang. Sri Mulyani juga menjelaskan Pada gelombang pertama, pemerintah telah mencairkan Rp 596,81 miliar dan gelombang kedua sebanyak Rp 1,02 triliun.⁹ Dari dana yang cukup besar tersebut, implementasi dari pelatihan online yang diberikan masih mengalami kendala dalam manajemen pelaksanaannya, seperti misalnya dalam mekanisme penerimaan peserta Kartu Prakerja serta sarana dan prasarana. Disisi lain, mengapa program Kartu Prakerja dinilai bermasalah adalah adanya konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan Kartu Prakerja.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dipersoalkan terkait kebijakan Kartu Prakerja, artikel ini juga akan memberikan penjelasan tentang kerangka kebijakan Kartu Prakerja melalui studi literatur dan juga analisis solusi dari dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan dengan model *Unemployment Insurance* (Asuransi Pengangguran)



Sumber foto : <https://www.sumbarfokus.com/berita-empat-juta-orang-mendaftar-kartu-prakerja-sejak-diluncurkan-ada-900-jenis-pelatihan-bagi-peserta.html>

⁶ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506110527-4-156650/konsumen-resah-corona-bikin-cari-kerja-makin-susah/2>

⁷ Lihat <https://www.beritasatu.com/ekonomi/622049-anggaran-meningkat-kartu-prakerja-disiapkan-untuk-56-juta-peserta>

⁸ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200415210918-20-493972/pakar-minta-anggaran-kartu-prakerja-dipakai-untuk-blt>

⁹ Lihat <https://money.kompas.com/read/2020/05/08/220300726/pemerintah-telah-cairkan-dana-pelatihan-kartu-prakerja-rp-1-6-triliun?page=all>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

2. KERANGKA KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA

Kebijakan Kartu Prakerja bukanlah hal baru dalam studi literatur. Sebab program serupa telah dilakukan oleh berbagai negara, baik di negara maju ataupun berkembang. Seperti contohnya Job Corps di Amerika Serikat, Program New Deal for the Young People di Inggris, dan Kebijakan-kebijakan untuk *Jóvenes* (Pemuda) di Amerika Latin dan Karibia. Dalam studi literatur, program Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk program dari apa yang disebut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006) sebagai *Active Labour Market Programmes/Policies* atau Program/Kebijakan Aktif untuk Pasar Tenaga Kerja (ALMP). Menurut International Labour Organization (ILO) (2016) ALMP merupakan intervensi kebijakan di pasar tenaga kerja secara "aktif" untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Tujuan utama dari ALMP adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi individu peserta program, artinya bantuan aktif bagi pasar tenaga kerja (Auer dkk 2008). Selain itu, tujuan ALMP menurut ILO (2016) juga untuk peningkatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesesuaian antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan peserta (dan sosial) serta penurunan biaya pemerintah.

“ *...program yang berbasis modal manusia, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan mempunyai dampak yang kecil* ”

Berdasarkan OECD (2006) dan Kluge dkk (2007) ada 4 kategori dalam ALMP, yakni (a) Asistensi mencari pekerjaan, (b) Pelatihan (untuk menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja), (c) Insentif untuk pekerjaan sektor privat dan (d) pekerjaan di sektor publik. Maka dalam pengertian itu Kebijakan Kartu Prakerja termasuk dalam kategori kedua yakni pelatihan. Menilik lebih lanjut dalam literatur lainnya, laporan mendalam oleh ILO (2016) tentang efektivitas ALMP dalam penerapannya di negara-negara Amerika Latin dan Karibia (yang merupakan negara berkembang seperti Indonesia) bahwa program yang berbasis modal manusia, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan mempunyai dampak yang kecil (bahkan beberapa kasus berdampak negatif) dalam periode jangka pendek. Menurut laporan tersebut, program tersebut akan berdampak lebih besar dalam periode jangka menengah atau jangka panjang (2 hingga 3 tahun setelah penyelesaian program). Hal ini juga diperkuat dengan studi lainnya oleh Card dkk (2010) yang menyatakan program ini akan lebih berdampak lebih banyak di periode jangka menengah dan jangka panjang. Begitu juga hasil studi Lechner dkk (2011) yang menyebutkan bahwa dampak pelatihan akan terwujud di periode jangka panjang atau bahkan periode yang sangat panjang.

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Masih menurut Laporan oleh ILO, jika ingin mencapai tujuan utama secara efektif dari ALMP adalah dengan bentuk program asistensi mencari pekerjaan dengan cara konseling dan memonitor para calon tenaga kerja. Meskipun dengan dampak yang kecil (bahkan nyaris tidak ada) dalam periode jangka pendek, kebijakan ALMP dalam bentuk program pelatihan adalah program yang paling populer karena dianggap program yang paling menjanjikan.

3. PETA PERMASALAHAN KARTU PRAKERJA

3.1. PERMASALAHAN PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA

Sesuai hasil analisis literatur, kebijakan Kartu Prakerja sudah dianggap tidak efektif dalam mengurangi pengangguran. Terlebih, saat ini Kartu Prakerja ditujukan untuk bansos COVID-19. Hal ini menambah permasalahan pelaksanaan dari Kartu Prakerja, contohnya adalah pemerintah kurang matang dalam mempersiapkan pada penguatan mekanisme basis data atau *data base* penerimaan pada target yang dituju. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Tauhid menilai realisasi Kartu Prakerja di 2020 terlalu cepat. Ahmad Tauhid menjelaskan pengerjaan data base ini perlu menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian dan lembaga lainnya yang terkait. Sehingga, Kartu Prakerja dalam realisasinya menjadi tepat guna dan tepat sasaran.¹⁰ Kemudian kurang memperhatikan kemampuan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, dan juga beberapa fasilitas /sarana dan prasarana penunjang seperti laptop dan ponsel pintar yang tidak semua masyarakat mempunyai. Berikut beberapa analisis permasalahan manajemen kebijakan Kartu Prakerja.

Pertama, orang yang tidak mengalami PHK bisa mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang bos perusahaan bukan korban PHK ataupun yang usahanya terdampak virus Corona lolos sebagai peserta program kartu prakerja. Dia adalah Founder dan CEO dari Portal Berita Hukum dan Politik Gresnews Agustinus Edy Kristianto.¹¹ Selain itu juga terjadi pro kontra antara Ajib Hamdani selaku ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP-HIPMI) dengan Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky. Aji Hamdani memberikan saran bahwa agar pemerintah bekerja sama dengan para asosiasi pengusaha dikarenakan terdapat data yang jelas terkait pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya. Dengan begitu, penerima akan lebih tepat sasaran, namun disisi lain Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky lebih memilih menggunakan sistem acak dan sekaligus untuk mengantisipasi bias subjektif.¹²

¹⁰ Lihat <https://www.merdeka.com/uang/indef-kartu-pra-kerja-baiknya-belum-direalisasikan-di-2020.html>

¹¹ Lihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4997640/viral-bukan-korban-phk-juga-dapat-kartu-pra-kerja-kok-bisa>

¹² Lihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4993042/peserta-kartu-pra-kerja-dipilih-acak-yakin-tepat-sasaran>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

“*...sistem acak yang dilakukan justru akan menimbulkan ketidakadilan oleh pekerja yang terdampak COVID-19*”

Akan tetapi tentu saja cara sistem acak yang dilakukan justru akan menimbulkan ketidakadilan oleh pekerja yang terdampak COVID-19 dan juga meningkatkan anggaran menjadi 2 kali lipat yang semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dikarenakan sasaran peserta meningkat dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang. Contoh lain terkait orang yang bukan korban PHK dapat mendaftar Kartu Prakerja adalah Abdul Rahman pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itu kebingungan saat diminta untuk melakukan verifikasi Kartu Prakerja. Dia menjelaskan terdapat link permintaan verifikasi Kartu Prakerja pada emailnya, padahal Abdul sendiri tidak pernah mendaftar. Selain itu link verifikasi baru bisa dikirim setelah yang bersangkutan melakukan pendaftaran dan upload foto dan KTP. Namun disini lain Menjawab hal ini, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky bilang, ada kemungkinan email yang bersangkutan digunakan oleh pihak lain. ¹³Dari contoh yang dialami Abdul Rahman, tentu saja kesalahan teknis seperti ini perlu segera diperbaiki oleh tim manajemen pelaksana prakerja agar pihak yang lebih membutuhkan dapat lebih terfasilitasi. Karena bisa contoh kasus yang dialami oleh Abdul Rahman dapat disalahgunakan.

Kedua, disaat wabah pandemi COVID-19 seperti pada saat ini, pendaftaran Kartu Prakerja dilakukan secara daring / online dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Namun, kenyataan yang ada dilapangan masih ada beberapa pekerja / buruh korban PHK yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran online dikarenakan tidak melek teknologi. Contohnya adalah kasus yang ada di Jateng sejumlah perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang membahas beberapa hal yang salah satunya soal kesulitan buruh untuk mengakses Kartu Prakerja. ¹⁴Kasus kedua adalah masih banyak masyarakat di Kabupaten Seluma yang belum tahu dan memahami tentang adanya program kartu prakerja. Hal ini ditandai dengan belum begitu banyaknya jumlah warga yang mendaftar setiap harinya ke Disnaker Seluma. Beberapa faktor yang menghambat pendaftaran menurut Ridwan Sabrin selaku Kepala Disnaker Seluma, adalah faktor masih lemahnya penguasaan ilmu teknologi calon peserta. ¹⁵ Dari kedua contoh kasus tersebut terlihat bahwa literasi digital yang dimiliki oleh korban PHK khususnya kaum buruh masih kurang. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan baru yang harus di berikan solusi dengan lebih dipermudah lagi dalam sistem pendaftarannya. Karena jika banyak masyarakat yang datang ke kantor dinas untuk meminta pendampingan, ini justru memberikan peluang penularan virus corona.

¹⁴ Lihat <https://www.solopos.com/gaptek-buruh-korban-phk-di-jateng-tak-bisa-akes-kartu-pra-kerja-1058598>

¹⁵ Lihat <https://www.radarbengkuluonline.com/2020/04/29/disnaker-siapkan-sdm-untuk-mendampingi-pelamar-program-kartu-pra-kerja/>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Ketiga, permasalahan yang muncul selanjutnya pada program Kartu Prakerja adalah sarana akses internet dari setiap kelompok masyarakat yang berbeda. Menurut Paska Darmawan, M.S dari tim riset CFDS (*Center of Digital Society*) yang mana merupakan pusat kajian yang berfokus dalam isu masyarakat digital, menjelaskan beberapa wilayah di Indonesia tidak memiliki sinyal kuat untuk mengakses internet, sementara sebagian besar masyarakat memakai internet dengan kuota data sehingga ketika mereka harus dituntut mengakses konten dari kelas, dan hampir semua berbasis video tentu ini akan menyulitkan mereka dalam mengakses konten tersebut. Oleh karenanya kesenjangan tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam Kartu Prakerja.¹⁶ Contoh wilayah yang mengalami kendala pada akses internet misalnya di daerah Maluku utara. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara Bagio menuturkan, pendaftaran gelombang pertama ditutup pada 17 April dan gelombang kedua dibuka mulai 20 April. "Gelombang pertama tidak ada yang mendaftar. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, Bagio menjelaskan, animo masyarakat mendaftarkan kartu prakerja menurun untuk wilayah Maluku Utara lantaran akses ke situs atau website yang agak sulit.¹⁷ Akses internet yang sulit dalam pendaftaran Kartu Prakerja juga dirasakan oleh Helen, masyarakat Desa Bungawaru, Kecamatan Teluk Mutiara. Helen menjelaskan meski sudah mendaftar Kartu Prakerja, dirinya selalu kesulitan dalam karena jaringan internet.¹⁸ Kendala lain juga dialami oleh pencari kerja di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Laurens Kiik Nahak memaparkan kalau sinyal tidak menjangkau seluruh wilayah Belu serta masih banyak pencari kerja yang belum terampil mengoperasikan android.¹⁹ Tidak hanya dari daerah timur Indonesia saja, masalah internet juga menjadi sorotan bagi para pelaku wisata di Gunung Kidul. Yudhi Prasetyo pengurus pokdarwis Telaga Jonge menjelaskan banyak warga yang kesulitan saat mencoba melakukan pendaftaran online karena akses internet yang tidak lancar.²⁰ Dari data-data diatas terkait kendala akses internet, memang beberapa masalah disebabkan oleh penyediaan BTS sinyal yang belum merata. Seperti yang dikutip dari National Geographic Indonesia, 30 September 2019, Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif mengatakan akan berkomitmen untuk meratakan program utama BAKTI yaitu penyediaan infrastruktur yang melalui Program Penyediaan Backbone Palapa Ring, Penyediaan BTS Sinyal, Penyediaan Satelit Multifungsi, dan Penyediaan Perangkat Penyiaran di Perbatasan. Selain itu Rudiantara yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan target pemerintah untuk Indonesia merdeka sinyal akan tercapai pada pertengahan tahun nanti pembangunan serat optik Palapa Ring ini akan menghubungkan 34 provinsi.²¹

Kemudian menyambung terkait akses internet yang masih cukup sulit di beberapa wilayah Indonesia, akan semakin menambah kesulitan bagi masyarakat dan akan berdampak memerlukan waktu lama untuk segera mendapatkan insentif. Disisi lain insentif akan keluar setelah mengikuti pelatihan online pada Kartu Prakerja. Hal ini akan merugikan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak untuk memenuhi beberapa kebutuhannya.

¹⁶ Lihat <https://www.kompas.com/edu/read/2020/04/24/173657771/ini-kata-tim-peneliti-ugm-tentang-penerapan-program-kartu-prakerja?page=all>

¹⁷ Lihat <https://www.malutpost.id/read/akses-sulit-kartu-prakerja-tak-laku-di-maluku-utara>

¹⁸ Lihat <https://bentara.net/ini-kendala-yang-dihadapi-masyarakat-alor-saat-daftar-kartu-pra-kerja/>

¹⁹ Lihat <https://kupang.tribunnews.com/2020/04/24/ini-kendala-yang-dialami-warga-belu-saat-daftar-kartu-prakerja>

²⁰ Lihat <https://jogja.tribunnews.com/2020/05/10/soroti-program-kartu-pra-kerja-hicon-ingin-konsepnya-ditinjau-ulang>

²¹ Lihat <https://nationalgeographic.grid.id/read/131868481/indonesia-merdeka-sinyal-2020-pemerataan-akses-telekomunikasi-dan-informasi-segera-terwujud?page=all>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Untuk mengatasi kesulitan akses internet tersebut beberapa daerah akan membantu menyediakan beberapa komputer untuk masyarakat di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengikuti pendaftaran ataupun pelatihan yang akan dipilih.²² Tetapi walaupun pemerintah menyediakan komputer di setiap daerah dan dilakukan pendampingan, protokol kesehatan diharapkan tetap dijaga agar tidak ada kontak langsung yang menimbulkan penularan penyebaran COVID-19.

3.2 . DISKONEKSI MANFAAT KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pada sub topik ini, permasalahan pada kebijakan Kartu Prakerja adalah pada diskoneksi program pelatihan dengan kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup, diskoneksi program pelatihan dengan kebutuhan skill yang dapat ditemukan di platform gratis serta diskoneksi program pelatihan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat COVID-19. Dari beberapa masalah tersebut menimbulkan pelatihan online pada kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat apabila diterapkan pada penanganan dampak COVID-19. Berikut analisis dari masalah-masalah tersebut lapangan.

“

...daripada anggaran pemerintah yang berjumlah cukup besar tersebut hanya sebagai pemborosan dalam pemberian pelatihan online, sebaiknya dapat direalokasikan kepada model bantuan secara langsung

”

Pertama, pada kondisi pandemi COVID -19 saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah untuk survive atau bertahan hidup. Fokus utamanya adalah masalah kesehatan dan ekonomi agar kelangsungan bertahan hidup dapat terjaga. Perlu diketahui bahwa masyarakat yang terkena PHK bukan karena tidak memiliki *skill*, akan tetapi karena kondisi wabah COVID-19, ini artinya masalah kesehatan menjadi kebutuhan utama bagi para pekerja yang terdampak COVID-19. Selain itu yang menyebabkan terjadinya PHK juga dikarenakan dalam rangka efisiensi perusahaan di tengah COVID-19. Dengan implementasi Kartu Prakerja yang dilakukan dengan skema dan *timing* tidak pas ini akan mengakibatkan masyarakat semakin tertekan. Misalnya adalah menimbulkan kerentanan sosial yang meliputi sikap apatis, tindakan irasional, dan tindak kriminal. Pasalnya, pemerintah seharusnya memberikan solusi yang langsung menasar pada kebutuhan dasar yang mendesak masyarakat yaitu dengan bantuan insentif yang diberikan.

²² Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/060000465/pelatihan-program-kartu-prakerja-dilakukan-secara-online-dan-offline>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Pada kasus ini misalnya produksi batik pekalongan yang menurun hingga 50-80% dikarenakan banyaknya pertokoan grosir batik di Jakarta yang menjadi pasar perajin tutup akibat dampak COVID-19.²³ Dari contoh kasus turunnya produksi batik pekalongan tersebut berimplikasi pada para pekerja yang terlibat dalam produksi batik dari hulu ke hilir akan terancam kehilangan pekerjaan dan dapat dipastikan mereka akan kehilangan pendapatan juga. Oleh karenanya daripada anggaran pemerintah yang berjumlah cukup besar tersebut hanya sebagai pemborosan dalam pemberian pelatihan online, sebaiknya dapat direalokasikan kepada model bantuan secara langsung yang akan menjadi solusi untuk setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan para pekerja. Pasalnya Peneliti INDEF (*Institute for Development of Economic and Finance*) Nailul Huda menyebut delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan Kartu Prakerja berpotensi meraup untung Rp3,7 triliun. Dengan masing-masing keuntungan jika dibagi rata Rp. 457 miliar per platform. Perhitungan tersebut berasal dari total biaya pelatihan program Kartu Prakerja yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun. Anggaran itu, kata Nailul, bila dibagi rata ke delapan platform masing-masing Rp700 miliar. Jumlah tersebut belum dikurangi biaya pembuatan video program, yang diperkirakan Nailul sebesar Rp243 miliar. "Maka, keuntungan setiap platform mencapai Rp457 miliar atau (jika ditotal) keuntungan yang dinikmati oleh 8 platform untuk Kartu Prakerja adalah Rp3,7 triliun. Menurut Nailul, jika keuntungan platform mitra Kartu Prakerja diberikan kepada penerima manfaat yang berhak. Seharusnya, besaran yang diterima per peserta Kartu Prakerja mencapai Rp2,9 juta dengan tambahan penerima manfaat sebanyak 1,3 juta orang. Beliau juga menambahkan pelatihan online dari Kartu Prakerja tidak inklusif dan menguntungkan aplikator penyedia pelatihan online."²⁴

Kedua, beberapa materi yang disediakan pada platform Kartu Prakerja pada umumnya banyak tersedia pada platform-platform yang tidak berbayar dan juga tersedia di YouTube atau Google.²⁵ Keterampilan dan keahlian, sebagaimana dimaksudkan pemerintah untuk pemegang Kartu Prakerja, sejatinya lebih dominan unsur pengalaman alias praktik dan pembuktian langsung, misalnya kursus menjadi tukang cukur dan tukang jahit. Ketika pemerintah menerapkan pelatihan secara online, pemerintah memberikan kesan adanya pendangkalan makna keterampilan dan keahlian yang dibuktikan dengan hanya menonton video dan membaca materi. Dengan adanya ketersediaan pelatihan-pelatihan pada konten yang tidak berbayar tersebut, ini menunjukkan bahwa materi kebijakan Kartu Prakerja cenderung tidak dipersiapkan secara matang dan hanya mengkompilasi yang ada di platform gratis, tanpa ada sistematisasi yang memadai dan tanpa adanya keterkaitan antara tujuan pelatihan dengan materi yang ditawarkan. Beberapa contoh pelatihan pada Kartu Prakerja yang juga tersedia di youtube adalah misalnya kasus Rio Pambudi seorang pria asal Pati, Jawa Tengah yang mengikuti pelatihan sekretaris atau administrasi yang ditawarkan platform Ruangguru. Menurut Rio, Dia mengaku hanya mendapatkan materi berupa cara menggunakan Microsoft Powerpoint dan Microsoft Word. Menurut Rio, materi seperti itu bisa didapatkan dengan mudah dan gratis di YouTube. Selain itu, ia juga merasa pelatihan yang diberikan tak efektif karena tidak ada pengawasan selama proses pembelajaran. Ujung-ujungnya, peserta bisa saja asal menonton video di setiap kelas.²⁶

²³ Lihat https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1413862/produksi-batik-menurun-akibat-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

²⁴ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200422140133-92-496105/indef-untung-8-platform-kerja-sama-kartu-prakerja-rp37-t>

²⁵ Lihat <https://money.kompas.com/read/2020/04/25/211810826/gaduh-dana-rp-56-triliun-kartu-prakerja-untuk-bayar-pelatihan-atau-jadi-bl?page=all>

²⁶ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200427075350-532-497495/beda-rasa-pelatihan-kartu-prakerja-vs-konten-gratis-youtube>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Selain itu Penelusuran detikcom di situs web mitra Kartu Pra Kerja, biaya pelatihannya bervariasi. Di Tokopedia misalnya, ada yang dibanderol Rp 74 ribu untuk kursus menjadi jurnalis profesional. Adapun pelatihan untuk mengoptimalkan sosial media dengan jitu dibanderol Rp 950 ribu. Lalu di situs web Skill Academy ada pelatihan paket komplit seleksi kompetensi dasar CPNS senilai Rp 77 ribu. Lalu ada pelatihan berjudul '2 Jam Pahami Pemasaran Online untuk Memulai Bisnis Anda' senilai Rp 329 ribu. Kemudian Di platform Pijar Mahir, biaya pelatihannya ada yang Rp 75 ribu untuk materi 'melakukan marketing untuk bisnis kuliner' dan Rp 200 ribu untuk pelatihan membuat laporan keuangan usaha menggunakan Microsoft Excel. Jika ditelusuri, materi-materi serupa berkecukupan di YouTube dan tentunya gratis untuk siapa saja dan dapat ditonton kapanpun.²⁷

“

Penurunan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 ini tentu saja berdampak dengan tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang baru, merosotnya investasi dan juga kegiatan UMKM yang menurun

”

Ketiga, adalah tidak adanya kesiapan pasar untuk menerima tenaga kerja saat pandemi COVID - 19. Seperti contohnya adalah Hotel dan pariwisata tidak dapat dimungkiri menjadi sektor pertama yang merasakan keterpurukan kala COVID-19 menyerang. Sinergi antara hotel dan pariwisata membuat keduanya tidak dapat dipisahkan. Akibatnya keduanya harus menelan kerugian saat salah satunya merugi. Menurut Yushwohady pakar marketing dan Inventure Consulting, dengan pelarangan orang bepergian dan keluar rumah, *hospitality* dan *tourism* merupakan sektor yang paling terdampak oleh wabah COVID-19. Okupansi hotel kini sudah mendekati zero dengan pemberlakuan PSBB yang makin ketat. Dalam kondisi amat memprihatinkan tersebut, beberapa hari terakhir hotel-hotel memasuki situasi '*survival mode*'.²⁸ Dari hal tersebut terlihat tidak adanya output yang jelas dari implementasi program Kartu Prakerja. Peserta hanya diberi pelajaran secara online secara terus menerus tanpa adanya kepastian setelah itu mereka akan dapat bekerja dimana. Padahal tujuan dari Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial. Sementara itu secara teknis, manfaat dari yang didapatkan dari adanya Kartu Prakerja ini adalah kelompok sasaran tersebut dapat mendapatkan biaya pelatihan guna meningkatkan dan mengasah bakat serta keterampilan diri.

²⁷ Lihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4986255/mirip-konten-di-youtube-berapa-biaya-pelatihan-kartu-pra-kerja>

²⁸ Lihat <https://www.wartaekonomi.co.id/read280898/dipukul-covid-19-habis-habisan-10-sektor-bisnis-ini-paling-babak-belur>

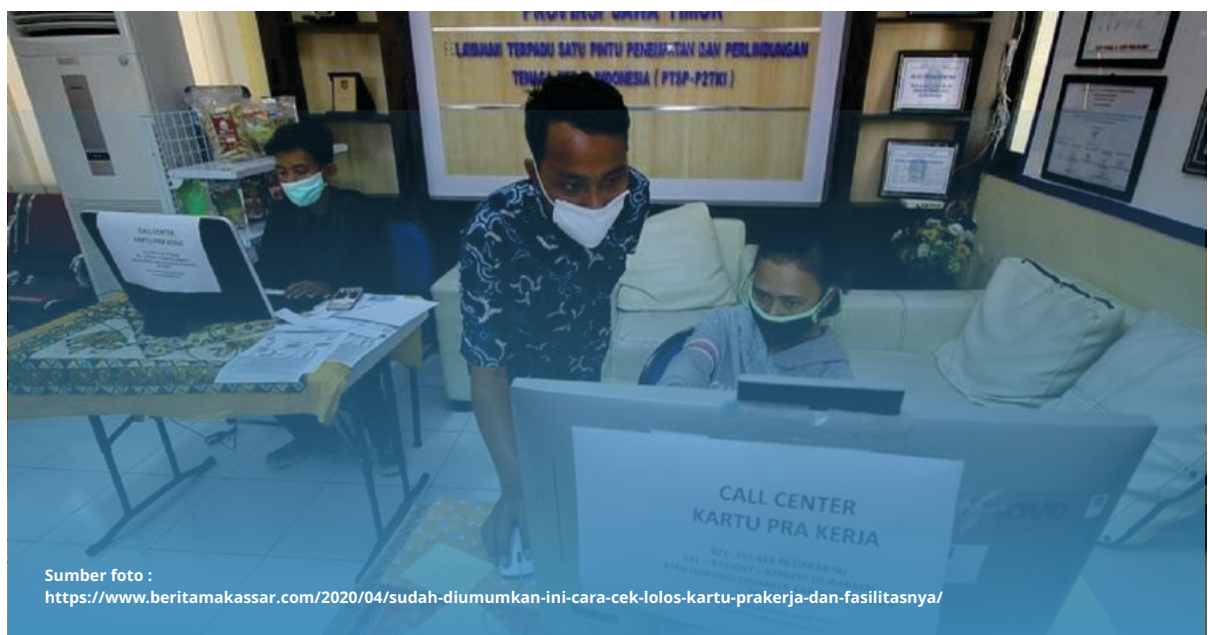
Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Melalui hal ini, diharapkan kelompok sasaran dapat menjadikan bantuan biaya pelatihan tersebut sebagai bekal atau tambahan ilmu untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan.²⁹ Dari manfaat kartu pekerja tersebut dapat dianalisis bahwa tujuan pelatihan adalah untuk mengasah keterampilan sebagai tenaga kerja agar bisa masuk ke perusahaan. Namun manfaat dari Kartu Prakerja yang menyiapkan pesertanya agar diterima di suatu perusahaan tampaknya tidak sinkron dengan kondisi saat COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan berkaca dari penjelasan KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun menjadi 2,3% dan lebih buruk bisa mencapai negative 0,4%.³⁰ Penurunan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID - 19 ini tentu saja akan berdampak dengan tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang baru merosotnya investasi dan juga kegiatan UMKM yang menurun.

Sebagai tambahan, selain dari 3 poin diatas, berikut beberapa comtoh kasus Kebijakan Kartu Prakerja yang menimbulkan diskoneksi pada kebutuhan masyarkat, khususnya pada korban PHK:

Hal ini seperti yang dialami oleh Filla (18) yang merupakan korban PHK dari sektor ritel di Semarang. Dia menjelaskan saat dirinya mencoba gelombang pertama, ia kesulitan memverifikasi *email*, memverifikasi kartu tanda penduduk, hingga mengunggah foto. Setelah semuanya dilakukan Filla mengaku tidak lolos pada geombang kedua, dan ia harus mengulang lagi proses pendaftaran dan akhirnya lolos yang kemudian dilanjut mengikuti pelatihan . Namun persoalan belum berakhir, meskipun sudah selesai mengikuti pelatihan sejak seminggu lalu, hingga kini sertifikat belum didapatkan dan insentifnya juga tertunda. Filla menginginkan saat pandemi COVID- 19 ini yang dibutuhkan korban PHK adalah bantuan sosial berupa bahan pokok atau bantuan langsung tunai.



Sumber foto : <https://www.beritamakassar.com/2020/04/sudah-diumumkan-ini-cara-cek-lolos-kartu-prakerja-dan-fasilitasnya/>

²⁹ Lihat <https://www.liputan6.com/news/read/4222561/realisasi-kartu-pra-kerja-dipercepat-ini-manfaat-hingga-cara-buatnya>

³⁰ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Begitupun yang dirasakan oleh Marta Marisina Simorangkir (31) merupakan korban PHK di perusahaan kontraktor di Jakarta. Dia sudah mengikuti pendaftaran hingga 3 kali dan baru lolos pada gelombang 3. Namun, ia menyayangkan program Kartu Prakerja justru menambah biaya. Ia menjelaskan bahwa yang justru dibutuhkan adalah bantuan sosial, ini dikarenakan karena sebelum mendapatkan insentif justru peserta harus mengeluarkan biaya paket internet data.³¹ Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bencana COVID -19, *demand* atau permintaan masyarakat pada dasarnya adalah bukan pelatihan *offline* dan terlebih juga bukan pelatihan *online* untuk para korban PHK dan orang yang menganggur. Dengan cara memaksakan berjalannya program Kartu Prakerja pada wabah saat ini, justru menggambarkan bahwa motivasi pemerintah semata-mata untuk kepentingan popularitas /popularitas agar tetap dapat terealisasi pada kebijakan program Kartu Prakerja dengan perencanaan yang tidak maksimal.

3.3. . KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA SARAT KEPENTINGAN

Selain permasalahan implementasi Kebijakan Kartu Prakerja yang telah disebutkan sebelumnya, Kartu Prakerja juga perlu dilihat dari kacamata politik. Hal ini bisa dilihat dari awal proses kartu prakerja dicanangkan. Kartu Prakerja merupakan salah satu janji politik Presiden Jokowi semenjak Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Pada kala itu, Jokowi berusaha menjawab pertanyaan dari lawan politiknya, Sandiaga Uno terkait tingginya tingkat pengangguran dari lulusan SMK sebesar 61%.³² kemudian ide program Kartu Prakerja ini pun muncul untuk mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan gratis. Setelah kembali menjadi Presiden, Jokowi memasukan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.³³ Namun, Kartu Prakerja dari awal didesain untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, bukan menjadi solusi untuk mengatasi dampak ekonomi karena pandemi seperti situasi saat ini.

Selain itu, perlu diingat ada kejanggalan dalam pemilihan delapan platform digital yang ditunjuk untuk menyediakan pelatihan. Mitra-mitra pemerintah tersebut telah ditunjuk terlebih dahulu sebelum payung hukumnya terbit.³⁴ Sedangkan, anggaran negara yang berpotensi masuk ke delapan mitra tersebut sangat tinggi. Sebab, setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan paket pelatihan daring dari mitra resmi senilai Rp. 1 juta. Artinya, jika pemerintah menargetkan 5,6 juta peserta maka potensi anggaran negara yang dapat masuk ke mitra digital platform tersebut adalah Rp. 5,6 Triliun. Bagi peserta Kartu Prakerja paket pelatihan daring tersebut tidak dapat dijadikan uang tetapi justru harus digunakan untuk pelatihan daring agar mendapatkan insentif uang setiap bulan Rp. 600 ribu selama empat bulan dan perlu mengisi survei agar mendapatkan insentif sebesar Rp. 50 ribu untuk tiga kali survei.³⁵

³¹ Lihat <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/07/kartu-prakerja-tak-selesaikan-persoalan-phk/>

³² Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190317221859-4-61173/ini-strategi-maruf-amin-pangkas-pengangguran-lulusan-smk>

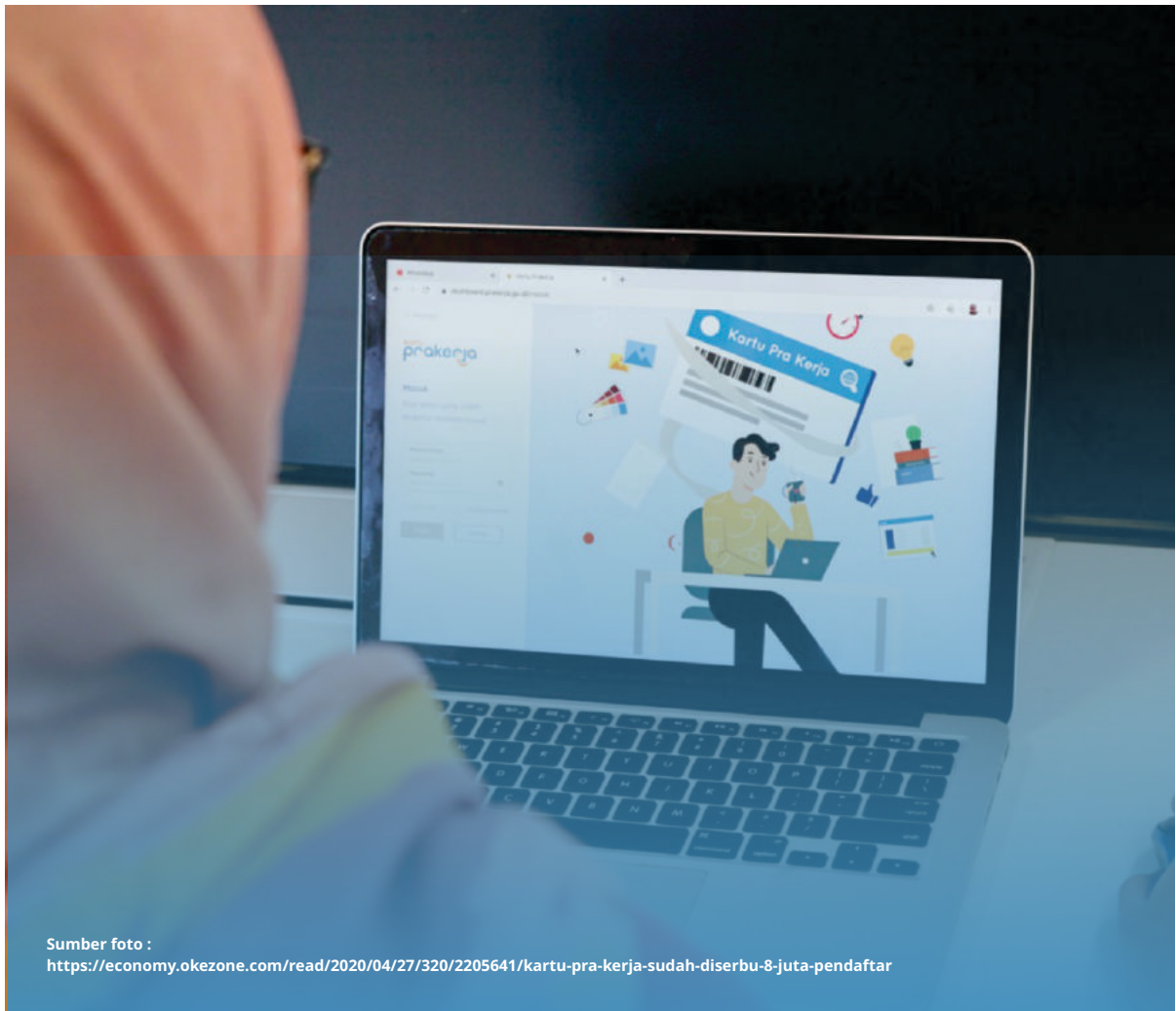
³³ Lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>

³⁴ Lihat <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160367/berantakannya-program-kartu-prakerja>

³⁵ Lihat <https://www.prakerja.go.id>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menganalisis bahwa program Kartu Prakerja menggunakan pendekatan kurasi atau penilaian atas proposal yang masuk, dan bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi KPPU menilai bahwa permasalahan di program tersebut bukan hanya masalah pemilihan, namun juga pada bagaimana sistem yang ada mampu mewujudkan persaingan yang sehat bagi para pelaku program. Apalagi, menurut KPPU, “pelaksanaan program ini dikaitkan dengan pemberian insentif keuangan kepada peserta Kartu Prakerja.”³⁶ Selain itu, menurut KPPU ada potensi kemitraan palsu antara platform dengan lembaga pelatihan padahal lembaga itu terafiliasi (integrasi vertikal). Maka sebenarnya itu tidak dapat dilakukan karena lembaga pelatihan itu termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga seharusnya semua lembaga pelatihan dapat tersedia di semua platform.³⁷

³⁶ Lihat Siaran Pers KPPU Nomor 27/KPPU-PRV/2020 dapat diakses di https://www.kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-No.-27_KPPU-PR_V_2020.pdf

³⁷ Lihat <https://bisnis.tempo.co/read/1340588/kppu-sebut-ada-potensi-kemitraan-palsu-dalam-kartu-prakerja/full&view=ok>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Dalam melihat kondisi ini, Resya Kania dalam artikelnya di *The Conversation* menjelaskan bahwa ada kelompok kepentingan yang berusaha memanfaatkan situasi pandemi COVID-19.³⁸ Menurutnya, berdasarkan konsep Kingdon mengenai proses pembuatan kebijakan, pemerintah berpacu dengan waktu untuk mengatasi dampak dari krisis yang memudahkan kelompok-kelompok kepentingan memasukan 'solusi' yang menguntungkan bagi mereka. Menurutnya, ini terlihat dari ketidaksesuaian dari rencana pemerintah di awal seperti tidak ada informasi ke publik yang cukup tentang proses kebijakannya, pengelola Kartu Prakerja diisi oleh pejabat Kantor Staf Presiden (KSP), materi pelatihan tidak tepat dan hanya teori tanpa praktik. Kania menegaskan bahwa "Kartu Prakerja merupakan solusi untuk kelompok kepentingan yang dibungkus sebagai solusi untuk masalah publik."



Sumber foto :
<https://bengkuluekspress.com/sudah-1-201-pekerja-bengkulu-yang-dirumahan-urus-kartu-pra-kerja/>

³⁸ Lihat <https://theconversation.com/kartu-prakerja-ketika-kelompok-kepentingan-terlibat-dalam-solusi-krisis-covid-19-137021>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

4. TAWARAN SOLUSI DAN REKOMENDASI

Melihat hasil studi literatur tentang kebijakan ALMP di berbagai negara lain, menunjukkan bahwa kebijakan ALMP dengan bentuk program pelatihan yang serupa dengan Kebijakan Kartu Prakerja mempunyai dampak yang insignifikan dalam mengurangi jumlah pengangguran. ALMP akan berdampak lebih besar jika menerapkan program dalam bentuk asistensi mencari pekerjaan. Hal ini ditambah dengan berbagai permasalahan manajerial, seperti peserta Kartu Prakerja tidak tepat sasaran dan masyarakat kesulitan mengakses; Diskoneksi antara kebutuhan yang mendesak dengan tujuan kartu prakerja hingga dugaan masalah Kartu Prakerja yang sarat kepentingan. Maka program atau kebijakan Kartu Prakerja perlu diganti dengan model yang lebih ideal untuk mengatasi pengangguran atau guncangan ekonomi, yakni *Unemployment Insurance Schemes* atau Skema Asuransi Pengangguran (AP).

“

Kebijakan AP juga didesain untuk menangkal risiko kemiskinan saat tidak bekerja atau di-PHK sambil menciptakan insentif bagi individu untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kompetensi kerja

”

Skema AP berfungsi untuk jadi jaring pengaman sosial selama individu mengalami PHK. Dalam laporan ILO, *Unemployment Insurance Schemes Around The World: Evidence and Policy Options* (2019a) yang ditulis oleh Antonia Asenjo dan Clemente Pignatti, kebijakan skema AP telah diimplementasikan baik di negara berkembang dan negara maju sebagai bentuk proteksi kepada pekerja terhadap risiko kehilangan pekerjaan. Kebijakan AP juga didesain untuk menangkal risiko kemiskinan saat tidak bekerja atau di-PHK sambil menciptakan insentif bagi individu untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kompetensi kerja. Dalam laporan ILO yang lain (2019b), kebijakan skema AP juga dianggap berbeda dengan kebijakan yang lain karena ia tidak selalu bergantung pada pasar tenaga kerja. ILO bahkan juga menekankan pentingnya bahwa skema AP perlu berjalan dengan baik di negara-negara berkembang karena skema AP dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan ekuitas. Skema AP ini tidak terdiri dari satu program tetapi mencakup beberapa tahapan program. Secara umum skema AP mempunyai dua tahapan mendasar: tahap pertama adalah tahapan *cash transfer* atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja yang terkena PHK agar pekerja tersebut masih dapat mempunyai sumber finansial untuk bertahan hidup (ILO, 2019a; 2019b).

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Sumber finansial ini bisa berasal dari pemerintah maupun kontribusi antara pekerja dan perusahaan (SMERU, 2019). Tahapan selanjutnya adalah tahapan ALMP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dengan program asistensi mencari pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah dengan cara konseling dan monitoring sehingga memudahkan tenaga kerja menemukan pekerjaan. Dengan catatan, tahapan kedua ALMP tersebut dapat dijalankan ketika situasi normal bukan situasi krisis seperti Pandemi COVID-19.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kebijakan skema AP ini berbeda dengan sistem pembayaran pesangon karena skema AP merupakan sistem di luar dari pembayaran pesangon. Ini terlihat dari Skema AP tidak hanya melakukan pembayaran satu kali untuk pekerja dan tidak hanya melakukan pembayaran bersumber dari perusahaan untuk ke pekerja yang di-PHK tetapi juga dari redistribusi finansial antara pekerja, perusahaan dan pemerintah. Itu semua dijalankan dan dijamin oleh pemerintah (ILO, 2019a).

The Smeru Research Institute (2019) pernah menyarankan dua opsi skema AP untuk diterapkan di Indonesia dalam periode jangka pendek dan periode jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, skema AP perlu dikelola oleh institusi publik yang mempunyai kapasitas mengelola dana dan basis data pekerja dengan profesional. Lalu diperlukan sistem proaktif yang mendorong angkatan kerja baru untuk memasuki pasar kerja atau mempekerjakan ulang para pekerja yang di-PHK. Itu dapat melalui pusat pelayanan kerja yang menyediakan bukan hanya pelatihan, magang, atau pun pekerjaan tetapi juga menyediakan konseling dan kewirausahaan. Hal ini tentu juga perlu dikolaborasi dengan perusahaan domestik dan luar negeri. Dalam periode jangka pendek, pekerja yang termasuk skema AP bisa dimulai dari pekerja sektor formal. Dalam periode jangka panjang, skema AP bisa mematangkan syarat indikator bagi peserta untuk mengikuti skema AP. selain itu, dengan bantuan dana dari pemerintah, skema AP juga dapat mencakup pekerja sektor informal.

Dalam situasi krisis seperti situasi Pandemi COVID-19, Skema AP yang berfungsi dengan baik sangat diperlukan. Program Kartu Prakerja tentu tidak dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya secara signifikan terbukti dari berbagai polemik yang telah disebutkan sebelumnya. Program kartu prakerja juga telah terbukti dalam studi literatur bahwa memiliki dampak yang kecil terhadap terserapnya calon pekerja di pasar tenaga kerja. Maka dari itu, dalam situasi COVID-19 pemerintah perlu segera merealokasi anggaran Kartu Prakerja untuk merintis skema AP. Program BLT adalah tahapan awal dalam skema AP bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, jika pasar tenaga kerja sudah kembali normal maka membuat institusi publik untuk membuat program-program ALMP. Terutama dalam bentuk program asistensi mencari pekerjaan bagi para tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja karena program tersebut jauh lebih efektif dibanding program pelatihan seperti kebijakan Kartu Prakerja.

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

REFERENSI

- Amri Bambani, A. (2020, 20 April). Kisah Mereka yang Mendaftar Kartu Prakerja. Kontan. Dapat diakses di :
<https://nasional.kontan.co.id/news/kisah-mereka-yang-mendaftar-kartu-prakerja?page=2>
- Anggraini, M. (2020, 8 April). Realisasi Kartu Prakerja Dipercepat, Ini Manfaat Hingga Cara Buatnya. Liputan 6. Dapat diakses di :
<https://www.liputan6.com/news/read/4222561/realisasi-kartu-pra-kerja-dipercepat-ini-manfaat-hingga-cara-buatnya>
- Aprita, A. (2020, 10 Mei). Soroti Program Kartu Pra Kerja, HICON Ingin Konsepnya Ditinjau Ulang. Tribun Jogja. Dapat diakses di :
<https://jogja.tribunnews.com/2020/05/10/soroti-program-kartu-pra-kerja-hicon-ingin-konsepnya-ditinjau-ulang?page=2>
- Auer, P., U. Efendioglu and J. Leschke. (2008). Active Labour Market Policies around the World: Coping with the Consequences of Globalization, 2nd edition. Geneva: ILO.
- Beyeng, P. A. (2020, 4 Mei). Ini Kendala yang Dihadapi Masyarakat Alor Saat Daftar Kartu Prakerja. Bentara Net. Dapat diakses di:
<https://bentara.net/ini-kendala-yang-dihadapi-masyarakat-alor-saat-daftar-kartu-pra-kerja/>
- Card, D., J. Kluge and A. Weber. (2010). Active Labour Market Policy Evaluations: A Meta-analysis, The Economic Journal 120, F452-F477.
- CNN Indonesia (2020, 13 April). Corona, Total 1,6 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Dapat diakses di:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-16-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>
- CNN Indonesia. (2020, 16 April). Pakar Minta Anggaran Kartu Prakerja Dipakai Untuk BLT. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200415210918-20-493972/pakar-minta-anggaran-kartu-prakerja-dipakai-untuk-blt>
- CNN Indonesia. (2020, 22 April). INDEF: Untung 8 Platform Kerja Sama Kartu Pra Kerja Rp3,7 T. Dapat diakses di:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200422140133-92-496105/indef-untung-8-platform-kerja-sama-kartu-prakerja-rp37-t>
- CNN Indonesia. (2020, 27 April). Beda Rasa Pelatihan Kartu Prakerja vs Konten Gratis Youtube. Dapat diakses di:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200427075350-532-497495/beda-rasa-pelatihan-kartu-prakerja-vs-konten-gratis-youtube/1>
- Ernis, D. (2020, 2 Mei). Minim Bukti Kartu Sakti. Majalah Tempo. Dapat diakses di:
<https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160367/berantakannya-program-kartu-prakerja>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

- Fauzia, M. (2020, 8 Mei). Pemerintah Telah Cairkan Dana Pelatihan Kartu Prakerja Rp, 1,6 Triliun. Kompas. Dapat diakses di:
<https://money.kompas.com/read/2020/05/08/220300726/pemerintah-telah-cairkan-dana-pelatihan-kartu-prakerja-rp-1-6-triliun?page=all>
- Hamdani, T. (2020, 22 April). Mirip Konten di Youtube, Berapa Biaya Pelatihan Kartu Prakerja? Detik Finance. Dapat diakses di:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4986255/mirip-konten-di-youtube-berapa-biaya-pelatihan-kartu-pra-kerja>
- Herman. (2020, 17 April). Anggaran Meningkat, Kartu Prakerja Disiapkan Untuk 5,6Juta Peserta. Berita Satu . Dapat diakses di:
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/622049-anggaran-meningkat-kartu-prakerja-disiapkan-untuk-56-juta-peserta>
- Idris, M. (2020,4 April). Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Pra Kerja, Untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT? Kompas. Dapat diakses di:
<https://money.kompas.com/read/2020/04/25/211810826/gaduh-dana-rp-56-triliun-kartu-prakerja-untuk-bayar-pelatihan-atau-jadi-bl?page=all>
- ILO. (2016). A Review of the Effectiveness of Active Labour Market Programmes with a focus on Latin America and the Caribbean, Working Paper No.9. Dapat diakses di:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@inst/documents/publication/wcms_459117.pdf
- _____. (2019a). Unemployment Insurance Schemes Around The World: Evidence and Policy Options, Report. Dapat diakses di: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_723778.pdf
- _____. (2019b). What works: Promoting pathways to decent work. ILO: Geneva.
- Indraini, A. (2020, 27 April). Peserta Kartu Pra Kerja Dipilih Acak , Yakin Tepat Sasaran? Detik Finance. Dapat diakses di:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4993042/peserta-kartu-pra-kerja-dipilih -acak-yakin-tepat-sasaran>
- Jenahas, T. (2020, 24 April). Ini Kendala yang Dialami Warga Belu Saat Daftar Kartu Prakerja. Pos- Kupang . Dapat diakses di:
<https://kupang.tribunnews.com/2020/04/24/ini-kendala-yang-dialami-warga-belu-saat-daftar-kartu-prakerja>
- Kania, R. (2020, 30 April). Kartu Prakerja: Ketika Kelompok Kepentingan Terlibat dalam ‘Solusi’ Krisis COVID-19. The Conversation. Dapat diakses di: <https://theconversation.com/kartu-prakerja-ketika-kelompok-kepentingan-terlibat-dalam-solusi-krisis-covid-19-137021>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

- Kencana Bayu, R. M. (2020, 9 April) . ILO: 1,25 Miliar Pekerja Dunia Terancam Kena PHK Akibat Corona. Liputan 6. Dapat diakses di : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4223222/ilo-125-miliar-pekerja-dunia-terancam-kena-phk-akibat-corona>
- Kluve J., D. Card, Fertig M., Góra M., Jacobi L., Jensen P., Leetmaa R., Nima L., Patacchini E., Schaffner S., Schmidt C.M., van der Klaauw B., and A. Weber. (2007). Active Labor Market Policy in Europe: Performance and Perspectives. Berlin: Springer.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Siaran Pers KPPU Nomor 27/KPPU-PR/V/2020. Dapat diakses di: https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-No.-27_KPPU-PR_V_2020.pdf
- Lechner, M., Miquel, R. and C. Wunsch. (2011). Long-Run Effects of Public Sector Sponsored Training in West Germany, Journal of the European Economic Association.
- Madrim, S. (2020, 17 April). Survei SMRC: 77% Warga Maenilai Corona Ancam Penghasilan. Voa Indonesia. Dapat diakses di:
<https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-77-warga-menilai-corona-ancam-penghasilan/5376217.html>
- Malutpost. (2020, 21 April) . Akses Sulit, Kartu Prakerja tak Laku di Maluku Utara. Dapat diakses di:
<https://www.malutpost.id/read/akses-sulit-kartu-prakerja-tak-laku-di-maluku-utara>
- Manurung Yusuf, M. (2020 6 April). 4 Sebab PHK Buruh di Masa Pandemi Corona Versi KSPI. Tempo. Dapat diakses di :
<https://metro.tempo.co/read/1328446/4-sebab-phk-buruh-di-masa-pandemi-corona-versi-kspi/full&view=ok>
- Mukaromah Fadhotul, V. (2020, 13 April). Pelatihan Program Kartu Prakerja Dilakukan Secara Online dan Offline, Berikut Infonya. Kompas. Dapat diakses di:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/060000465/pelatihan-program-kartu-prakerja-dilakukan-secara-online-dan-offline>
- National Geographic Indonesia. (2019, 30 September). Indonesia Merdeka Sinyal 2020, Pemerataan Akses Telekomunikasi dan Informasi Segera Terwujud. Dapat diakses di:
<https://nationalgeographic.grid.id/read/131868481/indonesia-merdeka-sinyal-2020-pemerataan-akses-telekomunikasi-dan-informasi-segera-terwujud>
- Novika, S. (2020, 30 April). Viral Bukan Korban PHK Juga Dapat Kartu Pra Kerja, Kok Bisa. Detik Finance. Dapat diakses di:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4997640/viral-bukan-korban-phk-juga-dapat-kartu-pra-kerja-kok-bisa>
- OECD. (2006). OECD Employment Outlook. OECD: Paris.
- Patricia, S. (2020, 7 Mei). Kartu Prakerja Tak Selesaikan Persoalan PHK. Kompas. Dapat diakses di:
<https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/07/kartu-prakerja-tak-selesaikan-persoalan-phk/>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dapat Diakses di:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

- Pramudita Adi, B. (2020, 13 April). Dipukul COVID-19 Habis- Habisan. 10 Sektor Bisnis Ini Paling Babak Belur. Warta Ekonomi. Dapat diakses di:
[https://www.wartaekonomi.co.id/read280898/dipukul-covid-19-habis-habisan-10-sektor-bisnis-
ini-paling-babak-belur](https://www.wartaekonomi.co.id/read280898/dipukul-covid-19-habis-habisan-10-sektor-bisnis-ini-paling-babak-belur)
- Prodjo, A.W. (2020, 24 April). Ini Kata Tim Peneliti UGM Tentang Penerapan Program Kartu Prakerja. Kompas. Dapat diakses di:
[https://www.kompas.com/edu/read/2020/04/24/173657771/ini-kata-tim-peneliti-ugm-tentang-
penerapan-program-kartu-prakerja?page=all](https://www.kompas.com/edu/read/2020/04/24/173657771/ini-kata-tim-peneliti-ugm-tentang-penerapan-program-kartu-prakerja?page=all)
- Putra, P.H. (2020, 9 April). Produksi Batik Menurun Akibat COVID-19. Antara Jateng. Dapat diakses di:
[https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1413862/produksi-batik-menurun-akibat-covid-
19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews](https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1413862/produksi-batik-menurun-akibat-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews)
- Radar Bengkulu . (2020, 29 April). Disnaker Siapkan SDM Untuk Mendampingi Pelamar Program Kartu Prakerja. Dapat diakses di :
[https://www.radarbengkuluonline.com/2020/04/29/disnaker-siapkan-sdm-untuk-mendampingi-
pelamar-program-kartu-pra-kerja/](https://www.radarbengkuluonline.com/2020/04/29/disnaker-siapkan-sdm-untuk-mendampingi-pelamar-program-kartu-pra-kerja/)
- Rahayu, A.Y. (2019, 19 Agustus). Indef: Kartu Prakerja Baiknya Belum Direalisasikan di 2020. Merdeka. Dapat diakses di:
[https://www.merdeka.com/uang/indef-kartu-pra-kerja-baiknya-belum-direalisasikan-di-
2020.html](https://www.merdeka.com/uang/indef-kartu-pra-kerja-baiknya-belum-direalisasikan-di-2020.html)
- Rizqi, N. A. (2020, 28 April). Gaptek, Buruh Korban PHK di Jateng Tak Bisa Akses Kartu Pra Kerja. Solopos. Dapat diakses di:
[https://www.solopos.com/gaptek-buruh-korban-phk-di-jateng-tak-bisa-akes-kartu-pra-kerja-
1058598](https://www.solopos.com/gaptek-buruh-korban-phk-di-jateng-tak-bisa-akes-kartu-pra-kerja-1058598)
- Setiaji, H. (2020, 6 Mei). Konsumen Resah! Corona Bikin Cari Kerja Makin Susah. Dapat . CNBC Indonesia. Dapat diakses di:
[https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506110527-4-156650/konsumen-resah-
corona-bikin-cari-kerja-makin-susah/2](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506110527-4-156650/konsumen-resah-corona-bikin-cari-kerja-makin-susah/2)
- Sembiring, J.L. (2020, 1 April). Sri Mulyani: Sangat Berat: , Ekonomi RI Bisa Minus 0,4% di 2020. CNBC Indonesia. Dapat diakses di:
[https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-
ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020)
- Situs resmi program Kartu Prakerja. Dapat diakses di: <https://www.prakerja.go.id>
- Tri, R. (2020, 10 Mei). KPPU Sebut Ada Potensi Kemitraan Palsu dalam Kartu Prakerja. Tempo. Dapat diakses di: [https://bisnis.tempo.co/read/1340588/kppu-sebut-ada-potensi-
kemitraan-palsu-dalam-kartu-prakerja](https://bisnis.tempo.co/read/1340588/kppu-sebut-ada-potensi-kemitraan-palsu-dalam-kartu-prakerja)
- Smeru. (2019). Developing an Unemployment Insurance Scheme for Indonesia, Smeru Working Paper. Dapat diakses di
[https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_developing_unemployment_i
nsurance_draf_2019-9-5.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_developing_unemployment_insurance_draf_2019-9-5.pdf)

Kebijakan Kartu Prakerja:

Penuh Masalah dan Perlu Diganti
dengan Skema Asuransi Pengangguran

Tim Pikiran Rakyat. (2019, 10 Desember). Bukan Untuk Menggaji Pengangguran, Presiden Jokowi Jelaskan Dua Tujuan Kartu Prakerja. Dapat diakses di :

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01324949/bukan-untuk-menggaji-pengangguran-presiden-jokowi-jelaskan-dua-tujuan-kartu-prakerja>

Wareza, M dan Pablo, S. (2019,17 Maret). Ini Strategi Ma'ruf Amin Pangkas Pengangguran Lulusan SMK. CNBC Indonesia. Dapat diakses di :

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190317221859-4-61173/ini-strategi-maruf-amin-pangkas-pengangguran-lulusan-smk>




Kebijakan Kartu Prakerja: Penuh Masalah dan Perlu Diganti dengan Skema Asuransi Pengangguran

Created by



**Institute of Governance
and Public Affairs**

 igpa.map.ugm.ac.id

 [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)



Forbil Institute

 forbil.id

 [forbilinst](https://www.instagram.com/forbilinst)